



Pemerintah Kabupaten
Gresik



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025



diskominfo.gresikkab.go.id



kominfo@gresikkab.go.id



03139928780



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/1369/HK/437.12/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

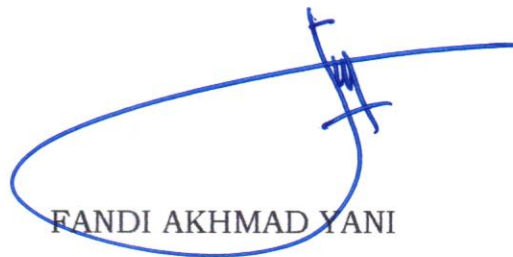
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/~~1369~~/HK/437.12/2024

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.	a. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026; b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026.
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.	a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renja Tahun 2026; b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2026; dan



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			c. memeriksa dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2026 kepada Ketua Tim.
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Kerja Perumusan Rencana Kerja Bidang Statistik dan Informasi Publik a. Ketua b. Anggota	Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. 1) BAHTIAR AHMAD, S.AP., Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik; dan 2) MUNIF, S.E., Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Statistik dan Informasi Publik; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Statistik dan Informasi Publik; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Statistik dan Informasi Publik; d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Statistik dan Informasi Publik;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Statistik dan Informasi Publik; f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan Bidang Statistik dan Informasi Publik.
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Kerja Bidang Teknologi dan Informatika a. Ketua b. Anggota	Kepala Bidang Teknologi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. 1) INDIRA ALIMSYAH, S.Kom., M.T., Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik; dan	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Teknologi dan Informatika; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Teknologi dan Informatika; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Teknologi dan Informatika;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		2) RISTA NOVITASARI, S.Kom., M.T., Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.	d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang Teknologi dan Informatika; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Teknologi dan Informatika; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan Bidang Teknologi dan Informatika.
5.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Kerja Bidang SPBE a. Ketua b. Anggota	Kepala Bidang SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. 1) FATMAWATI, S.Kom., M.AP., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik; dan	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang SPBE; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang SPBE; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang SPBE;

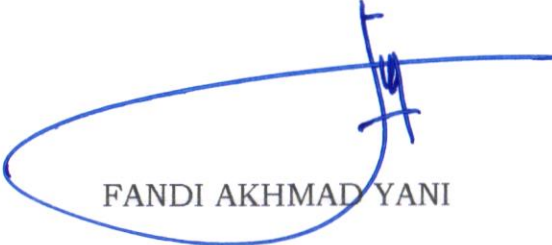


NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		2) ZENNI ARI KUSTANTI, S.Kom., M.T., Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.	d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang SPBE; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang SPBE; f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan Bidang SPBE.
6.	Kelompok Kerja V Perumusan Rencana Kerja Sekretariat a. Ketua b. Anggota	Perencana Ahli Muda Sekretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. 1) Kasubbag. Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik; dan 2) Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Sekretariat; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat; d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Sekretariat;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.	e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Sekretariat; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan lingkup Sekretariat.

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI





PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.60 Telp (031) 3975454 Fax (031) 3975454

Website : <http://www.gresikkab.go.id> email : diskominfo@gresikkab.go.id

G R E S I K 61121

PERATURAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan Tahun 2023-2043
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3)
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025;
19. Keputusan Bupati Gresik nomor : 050/ 1369 /Hk/437.12/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2026;
20. Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2025-2029;
21. Keputusan Bupati Gresik nomor : 050/ 1369 /Hk/437.12/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

Pasal 1

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
BAB III	:	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	:	PENUTUP

Pasal 2

Uraian Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2026.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal : 23 Oktober 2025

Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK



KIKI NURIYADI, S.P., M.M.,
Pembina TK I

NIP. 19730622 199803 1 004

DAFTAR ISI

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK**

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I – PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum.....2

1.3 Maksud dan Tujuan.....4

1.4 Sistematika Penulisan.....5

**BAB II – EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU..... 6**

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra. ...6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 79

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 96

BAB III – TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 104

3.1 Telaahan terhadap Prioritas Nasional 104

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....105

3.3 Program dan Kegiatan..... 111

**BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA127**

BAB V – PENUTUP146

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029. RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan tahunan, serta sebagai instrumen penting untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan Tahun 2026 dalam urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Proses penyusunan RKPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2026. Mengutamakan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah..

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2025 adalah Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 sebagai perwujudan dari undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Pemerintah, yang ditindaklanjuti dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten Gresik Tahun 2025–2029.

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan Tahun 2023-2043
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3)
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025
19. Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2026 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini adalah sebagai :

1. Acuan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik dalam mengoperasionalkan Perubahan RKPD Kabupaten Gresik tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2026.
3. Mewujudkan kesinambungan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, RKPD Kabupaten Gresik dan RPJMD Kabupaten Gresik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Kerja
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Untuk mencapai Kinerja Sasaran Strategis dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik ditunjang dengan anggaran Belanja. Pagu APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2024 sebesar **Rp 24.196.017.389,00** (Dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh enam juta tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah). Pada bulan Maret pagu Diskominfo mengalami pergeseran menjadi sebesar **Rp 24.618.017.389,00** (Dua puluh empat milyar enam ratus delapan belas juta tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dari penambahan anggaran DBHCHT. Pagu akhir PAPBD tahun 2024 menjadi sebesar **Rp 24.656.433.095,00** (Dua puluh empat milyar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh lima Rupiah). Pagu tersebut di atas untuk melaksanakan 5 sasaran, 5 program, 11 kegiatan dan 40 sub kegiatan.

pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 melalui 5 (lima) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran/utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2024, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	ANGGARAN		
			PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Yang disediakan	1. Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	606.756.000	105.200.000	99,47%
		2. Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	105.200.000	100.866.614	95,88%
		3. Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	5.981.044.000	5.955.203.781	99,57%
2	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	1. Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	246.705.900	236.699.109	95,94%
		2. Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	1.378.294.100	1.354.456.822	98,%
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data	8.851.422.125	8.061.131.262	91,07%
4	Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan	967.931.181	916.324.753	94,67%
5	Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	248.756.275	234.909.366	94,43%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa analisis kinerja Anggaran disajikan dalam perbandingan antara target alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase capaian realisasi. Pada tahun 2024 pencapaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 5 (lima) sasaran terealisasi sebesar **Rp 23,565,459,261.30** (Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah tiga Puluh Sen) ekivalen **95,58%**. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Gresik, pada dasarnya kegiatan dan program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik mendukung pembangunan dan system pemerintahan yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD dalam bidang teknologi informatika terutama dalam pencapaian indeks system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Tabel 2.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Peranngkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (kumulatif)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 (2021-2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024(%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	4	5	6	7		8		9		14=10+11+12+13		15=14/9x100	
	Dinas Komunikasi dan Informatika				164,263,013,835		43,474,927,314		24,656,433,095		23,565,459,261		95.58
	Urusan Bidang Komunikasi dan				153,431,274,835		42,552,564,643		23,439,745,639		22,414,225,142		95.62

	Informatika												
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	600	54,362,614,835	300	18,570,154,103	100	6,270,323,514	100	6,102,334,779	100	97.32
	Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan dan pelaporan	dokumen/laporan	8	270,363,370	5	81,401,075	1	22,942,500	1	22,641,100	100	98.69
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				185,556,600		68,720,000		12,260,200		11,995,250		97.84
		Jumlah Peserta Rapat Penyusunan	Orang	150	51,492,000	150	56,154,400	-	-	-	-	-	0

		Dokumen Perencanaan											
		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis	8	134,064,600	5	12,565,600	1	12,260,200	1	11,995,250	100	97.84
2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKJiP, LPPD, SAKIP, Laporan Monev Kegiatan)	laporan	72	84,806,770	36	12,681,075	12	10,682,300	12	10,645,850	100	99.66
Rata - rata capaian kinerja (%)												100.00	98.69
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

	Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	sub kegiatan	18	27,891,8 44,018	9	11,894,4 25,897	3	4,684,1 70,775	3	4,627,42 5,384	100	98.79
1	Penyediaa n Gaji Dan Tunjangan	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN DISKOMINFO	Tahun	2	7,443,49 8,200	2	7,477,13 8,397	-	-	-	-	0	0
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	136	20,379,5 77,534	68	4,401,35 8,000	34	4,679,5 30,695	34	4,622,79 5,184	100	98.79
2	Koordinasi Dan Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD	laporan	2	3,420,00 0	2	4,366,00 0	-	0	-	-	0	0

		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	4	26,570,142	1	408,000	1	1,720,300	1	1,713,200	100	99.59
4	Koordinasi Dan Penyiapan Laporan Keuangan Bulanan / Tribulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran perangkat daerah	laporan	6	8,970,000	6	9,459,000		-	-	-	0	0
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran perangkat daerah	laporan	4	29,808,142	1	1,696,500	1	2,919,780	1	2,917,000	100	99.90

Rata - rata capaian kinerja (%)												100.00	98.79
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	sub kegiatan	18	8,597,000,000	6	2,298,044,550	-	-	-	-	0	0
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian kerja lapangan	stel	136	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	3	230,000,000	-	-	-	-	-	-	0	0
5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian				-		-		-		-		0

	Kinerja Pegawai												
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	3	825,000,000	-	-	-	-	-	-	0	0
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Cukai kepada masyarakat	kali	16	6,000,000,000	8	2,298,044,550	-	-	-	-	0	0
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	300	1,542,000,000	-	-	-	-	-	-	0	0
Rata - rata capaian kinerja (%)												0	0
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

	Administra si Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	sub kegiatan	42	4,984,15 9,165	14	1,291,02 9,146	7	419,107 ,954	7	353,751, 104	100	84.41
7	Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Pe nerbangan Bangunan kantor				111,552, 474		43,203,0 90		10,987, 464		10,823,5 00		98.51
	2021-2022 (renstra lama)	Jumlah Bahan Alat Listrik Jumlah Media Converter	Jenis	16	5,509,57 4	16	26,318,0 90	-	-	-	-	0	0
	2023-2026 (review renstra)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	106,042, 900	1	16,885,0 00	1	10,987, 464	1	10,823,5 00	100	98.51
8	Penyediaa n Peralatan Dan Perlengkap				2,385,21 3,897		607,430, 600		132,787 ,675		71,695,0 00		53.99

	an kantor												
		Jumlah Alat Pendingin Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Bahan Komputer Jumlah Komputer dan Peralatan Komputer	jenis	92	239,942,537	92	496,654,600	-	-	-	-	0	0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	24	2,145,271,360	6	110,776,000	6	132,787,675	3	71,695,000	50	53.99
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				115,284,320		38,581,000		9,997,632		9,811,400		98.14
		Jumlah Bahan Dan Peralatan pembersih	jenis	46	10,941,970	46	22,896,000	-	-	-	-	0	0

		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	104,342,350	1	15,685,000	1	9,997,632	1	9,811,400	100	98.14
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				483,718,078		131,756,000		59,282,868		59,278,500		99.99
		Jumlah Makanan dan Minuman	dos	550	38,463,078	550	84,356,000	-	-	-	-	0	0
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	445,255,000	1	47,400,000	1	59,282,868	1	59,278,500	100	99.99
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan				569,114,355		159,459,310		40,123,515		36,851,800		91.85

		Jumlah Banner Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan Jumlah jasa Publikasi Ucapan	buah (24 banner, 830 amplop, 2020 kertas kop bupati)	2874	33,114,355	2874	111,076,708	-	-	-	-	0	0
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	536,000,000	2	48,382,602	2	40,123,515	2	36,851,800	100	91.85
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan				64,432,500		14,610,000		1,441,800		1,230,000		85.31
		Jumlah Bahan Bacaan	Jenis	8	4,022,500	8	11,980,000	-	-	-	-	0	0

		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	16	60,410,000	4	2,630,000	4	1,441,800	4	1,230,000	100	85.31
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd				1,254,843,541		295,989,146		164,487,000		164,060,904		99.74
		Jumlah Fasilitas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jenis	4	26,000,000	4	178,695,694	-	-	-	-	0	0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	1,228,843,541	2	117,293,452	2	164,487,000	2	164,060,904	100	99.74

Rata - rata capaian kinerja (%)												100.00	84.41
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	paket	12	4,218,907,813	4	70,200,000	3	14,731,200	3	14,525,000	100	98.60
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2,550,000,000		-		-		-		0
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	8	2,550,000,000	-	-	-	-	-	-	0	0

	Pengadaan Mebel				843,907,813		70,200,000		14,731,200		14,525,000		98.60
		Jumlah Mebel/Kursi	buah	20	6,037,000	20	70,200,000	-		-	-	0	0
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	75	837,870,813	-	-	3	14,731,200	3	14,525,000	100	98.60
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				825,000,000		-		-		-		0
		jumlah ruangan kantor yang diberikan sekat antar meja/vertikal blind/kaca film/rak almari	paket	2		2							

		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	825,000,000	-		-		-		0	
Rata - rata capaian kinerja (%)												100.00	98.60
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	paket	18	5,451,597,887	6	2,256,958,210	3	797,679,085	3	754,600,317	100	94.60
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik				1,650,942,890		614,764,560		206,240,000		167,746,447		81.34

		Jumlah Operasional Bulanan	jenis	10	465,684,288	10	378,730,560	-		-	-	0	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	30	1,185,258,602	4	236,034,000	5	206,240,000	5	167,746,447	100	81.34
	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				519,254,997		156,543,650		40,561,085		40,368,700		99.53
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jenis	6	61,545,943	6	118,924,750	-	-	-	-	0	0

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	457,709,054	3	37,618,900	3	40,561,085	3	40,368,700	100	99.53
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3,281,400,000		1,485,650,000		550,878,000		546,485,170		99.20
		Jumlah Tenaga Administrasi Non Strata Satu, Jumlah Tenaga Administrasi Strata Satu, Jumlah Tenaga Keamanan, Jumlah Tenaga Kebersihan	orang	36	1,000,200,000	36	980,000,000	-	-	-	-	0	0

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	76	2,281,200,000	19	505,650,000	19	550,878,000	19	546,485,170	100	99.20
Rata - rata capaian kinerja (%)												100.00	94.60
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	paket	12	2,948,742,582	4	678,095,225	2	331,692,000	2	329,391,874	100	99.31
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya				1,164,261,620		421,702,900		184,360,000		183,115,552		99.32

	Pemeliharaan , Pajak Dan Perijinan Kendaran Operasion al Atau Lapangan												
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	kendaraan	12	65,393,620	12	248,225,700	-	-	-	-	0	0
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	kendaraan	28	1,098,868,000	6	173,477,200	7	184,360,000	7	183,115,552	100	99.32
	Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor Dan Bangunan				1,784,480,962		256,392,325		147,332,000		146,276,322		99.28

	Lainnya												
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara	paket	1	109,900,000	1	256,392,325	-		-	-	0	0
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	4	1,674,580,962	-	-	1	147,332,000	1.00	146,276,322	100	99.28
Rata - rata capaian kinerja (%)												100.00	99.31
Predikat Kinerja												San gat Ting gi	San gat Tin ggi
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												100.00	97.32
Predikat Kinerja												San gat Ting gi	San gat Tin ggi

	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1. Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi	persen	600	21,907,517,000	300	5,396,418,838	100 %	6,693,000,000	100 %	6,659,603,170	100	99.50
		2. Presentase jenis informasi publik penyelenggara n pemerintah yang dipublikasi	persen	600%		300 %		100 %		100 %		100	
		3. Persentase permintaan data yang difasilitasi PPID	persen	600%		300 %		100 %		100 %		100	
	Pengelolaan informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	- . Jumlah panggilan kedaruratan yg difasilitasi	buah	1,185	21,907,517,000	768	5,396,418,838	-	6,693,000,000	-	6,659,603,170	0	99.50

		-. Jumlah Konten penyelenggaraa n pemerintahan yang Di Publikasikan melalui media	buah	5,209		6,017		-		-		0	
		-. Jumlah Media yang dimanfaatkan untuk publikasi informasi penyelenggaraa n pemerintahan	buah	15		15		-		-		0	
		-. Jumlah Pengaduan yang masuk dan difasilitasi	buah	683		480		-		-		0	
		-. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	buah	2		7		-		-		0	

		-. persentase Pengaduan yang ditanggapi tepat waktu	Persen	400%		100 %		-		-		0	
		-. persentase permohonan informasi publik yang dicukupi	Persen	400%		100 %		-		-		0	
		-. Jumlah informasi publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	buah	100		25		-		-		0	
		-. Jumlah informasi penyelenggaraa n pemerintahan yang dipublikasikan	buah	11,498		2,668		-		-		0	
		-. Jumlah lembaga komunikasi publik yang digunakan untuk	lembaga	95		23		-		-		0	

		penyebarluasan edukasi											
		1. Persentase OPD yang menindaklanjuti pengaduan tepat waktu	Persen	285,21 %				95.6%		100 %		104.60	
		2. Persentase panggilan kedaruratan yg ditindaklanjuti	Persen	300%				100 %		100 %		100.00	
		3. Jumlah OPD yang menyediakan Daftar informasi dan dokumentasi publik	lembaga	27				7		12		171.43	
		4. Jumlah konten informasi pemerintah yang dipublikasikan	buah	6,030				2005		5,701		284.34	

	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rapat koordinasi fasilitasi PPID	kali	9	1,099,01 4,400	9	226,141, 410	-	42,856, 000		39,860,7 75		93.01
		Jumlah rapat koordinasi fasilitasi pengaduan di aplikasi lapor.go.id	kali	15	178,131, 000	15	209,708, 110	-		-	-	0	0
		jumlah pelatihan penggunaan aplikasi lapor.go.id	kali	3		3		-		-		0	0
		jumlah Sosialisasi terkait informasi publik oleh PPID lingkup OPD	kali	3		3		-		-		0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokume n	4	920,883, 400	1	16,433,3 00	1	42,856, 000	1	39,860,7 75	100	93.01

	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1,907,546,137		992,747,809		130,000,000		128,463,721		98.82
		Jumlah pemeliharaan website gresikkab.go.id	paket	2	620,275,437	2	826,883,909			-	-		0
		Jumlah pemeliharaan website SiDesa	paket	1		1		-		-		0	0
		Jumlah pemeliharaan website siklip	paket	1		1		-		-		0	0
		Jumlah pemeliharaan website PPID	kali	1		1		-		-		0	0
		Jumlah lisensi flipping	Dokumen	1		1		-		-		0	0
		Jumlah rapat koordinasi update data penyelenggara pemerintahan	kali	7		7		-		-		0	0

		dengan OPD											
		jumlah koordinasi kegiatan OPD yang dipublikasikan	kali	51		51		-		-		0	0
		Jumlah lisensi cpanel tahunan	paket	3		3		-		-		0	0
		jumlah web hosting OPD yang di kelola	paket	45		45		-		-		0	0
		Jumlah Pembelian PC untuk desain grafis	paket	2		2		-		-		0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	4	1,287,270,700	1	165,863,900	1	130,000,000	1	128,463,721	100	98.82

	Pengelolaan Media Komunikasi Publik				4,614,273,763		2,125,464,958		793,000,000		789,206,000		99.52
		Pembuatan Perda Radio suara Gresik	perda	1	1,352,661,963	1	1,702,886,228			-	-	0	0
		Jumlah Koordinasi dengan Balmon dan pusat terkait perijinan Radio	kali	3		3		-		-	-	0	0
		Jumlah Iuran tahunan frekuensi radio	lisensi	1		1		-		-	-	0	0
		Jumlah sewa internet (Mbps)	paket	30		30		-		-	-	0	0
		Jumlah Tenaga Penyiar yang di rekrut	orang	15		15		-		-	-	0	0
		Jumlah Tenaga teknisi radio	orang	1		1		-		-	-	0	0
		Jumlah Tenaga kontent kreatif untuk sosial media	orang	2		2		-		-	-	0	0

		Jumlah Tenaga kontent kreatif untuk video	orang	1		1		-		-		-	0	0
		jumlah lisensi lagu yang dibeli	buah	950		950		-		-		-	0	0
		Jumlah lisensi radiobost	paket	1		1		-		-		-	0	0
		Jumlah lisensi Adobe Audition	paket	2		2		-		-		-	0	0
		jumlah pemeliharaan pemancar radio FM	paket	2		2		-		-		-	0	0
		jumlah Pemeliharaan peralatan streaming	paket	2		2		-		-		-	0	0
		jumlah reportase yang dilakukan	kali	372		372		-		-		-	0	0
		jumlah domain dan hosting suaragresik.id	paket	2		2		-		-		-	0	0
		jumlah penayangan di media televisi	kali	2		2		-		-		-	0	0

		Jumlah rapat monitoring dan evaluasi crew radio	kali	92		92		-		-	-	0	0
		Jumlah rapat monitoring dan evaluasi media	kali	12		12		-		-	-	0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	4	3,261,611,800	1	422,578,730	1	793,000,000	1	789,206,000	100	99.52
	Pelayanan Informasi Publik				1,128,920,000		20,845,565		50,000,000	-	45,893,614	0	91.79
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	4	1,128,920,000	1	20,845,565	1	50,000,000	1	45,893,614	100	91.79
	Layanan Hubungan Media				2,284,895,000		203,447,996		5,000,000,000	-	4,979,720,085	0	99.59

		Jumlah Layanan Hubungan Media	layanan	4	2,284,895,000	1	203,447,996	1	5,000,000,000	1	4,979,720,085	100	99.59
	Manajemen Komunikasi Krisis				7,575,843,400		1,713,152,600		563,900,000		563,672,000		99.96
		Jumlah Tenaga Call Taker dan dispatch yang di rekrut	orang	21	4,322,970,400	21	1,157,746,600		-	-	-	0	0
		jumlah tenaga sound dan multi media center	orang	2		2		-		-	-	0	0
		Jumlah sewa aplikasi kedaruratan call 112	tahun	2		2		-		-	-	0	0
		Jumlah sewa Backup internet (Mbps)	tahun	50		50		-		-	-	0	0
		Jumlah Pembangunan media Centre	unit	1		-				-	-	0	0

		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	dokumen	4	3,252,873,000	1	555,406,000	1	563,900,000	1	563,672,000	100	99.96
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik				995,514,100		63,360,500		-	-	-	0	0
		Jumlah Jatim Kominfo Festival (JKF) yang di ikuti oleh KIM	kali	1	31,719,000	1	54,360,500		-	-	-	0	0
		Jumlah pelatihan untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	kali	4		5		-		-	-	0	0
		Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat	Orang	520	963,795,100	130	9,000,000	-	-	-	-	0	0

		Kapasitasnya										
	penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas				1,136,603,200		-	55,200,000	-	54,973,000	0	99.59
		Jumlah rekomendasi Branding Kabupaten Gresik	laporan	5	266,603,200	-			-	-	0	-
		Jumlah Kebijakan Branding Kabupaten Gresik	laporan	2		-			-	-	0	-

		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	4	870,000,000	-	-	1	55,200,000	1	54,973,000	100	#####
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1,164,907,000		51,258,000		58,044,000	-	57,813,975	0	99.60

		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	unit	12	1,164,907,000	3	51,258,000	3	58,044,000	3	57,813,975	100	99.60
Rata - rata capaian kinerja (%)												165.09	99.50
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK												100.00	99.50
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Aplikasi Informatika	1. Presentase OPD yang Memanfaatkan Ruang Server	Persen	150%	77,161,143,000	156%	18,585,991,702	25%	10,476,422,125	100%	9,652,287,193	400	92.13	

		2. Persentase OPD yang Menerapkan Manajemen Aset TIK	Persen	252%		34%		50 %		50%		100	
		3. Persentase OPD yang Menggunakan Sistem Penghubung Layanan	Persen	252%		28,0 8%		50 %		26,0 8%		0	
		4. Persentase OPD yang Menerapkan Manajemen Data	Persen	252%		28,0 8%		50 %		50%		100	
		1.Prosentase Dokumen Kebijakan yang dievaluasi	Persen	600%		300 %		100 %		100 %		100	
		2. Persentase Indikator SPBE yang dievaluasi	Persen	600%		300 %		100 %		100 %		100	
		3. Persentase OPD yang Berkolaborasi dalam	Persen	525%		164 %		100 %		100 %		100	

		Penerapan SPBE											
		4. Persentase aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi	Persen	272%		53% (8/15)		53% (8/15)		53%		75	
		5. Persentase OPD yang menerapkan Manajemen Layanan SPBE	Persen	210%		95%		50%		50%		100	
	Pengelolaan Nama Domain Yng Telah Di Tetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerinta	-. Kapasitas Bandwith Internet untuk perkantoran pemerintahan	Gb	9.60	43,697,766,088	2	12,596,167,182	-	8,565,071,825	-	7,799,521,945	0	91.06

	h Daerah Kabupaten /kota											
		- Jumlah kelurahan, kecamatan dan OPD yang terlayani jaringan intranet	OPD	176		176		-	-		0	
		- jumlah pemeliharaan jaringan intra	paket	2		2		-	-		0	
		- jumlah pemeliharaan jaringan Fiber Optik	paket	2		2		-	-		0	
		- jumlah pemeliharaan jalur CCTV	paket	2		2		-	-		0	
		2. Jumlah OPD yang dibina untuk menerapkan	OPD	50		5		10	23		230 .00	

		manajemen Aset TIK										
		1. Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah	persen	276% (2417/35040 jam)				7.884 jam (90% dari 8.760 jam)		93.71% (7387.89 jam dari 8760 jam)		104%
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				43,697,766,088		12,596,167,182		8,565,071,825		7,799,521,945	91.06
		Kapasitas Bandwith Internet untuk perkantoran pemerintahan	GBps	1.50	8,813,204,511	1.50	8,188,320,773	-		-	-	0

		Jumlah Kelurahan, Kecamatan Dan OPD Yang Terlayani Jaringan Intranet	lembaga	176		176		-		-	-	0	0
		Jumlah metro untuk mendukung jaringan intra pemerintah	unit	88		52		-		-	-	0	0
		Jumlah tenaga ahli jaringan yang di rekrut	orang	2		2		-		-	-	0	0
		jumlah server clustering yang diadakan	unit	4		4		-		-	-	0	0
		Jumlah iuran As number (tahunan)	tahun	2		2		-		-	-	0	0
		jumlah pemeliharaan jaringan intra	paket	2		2		-		-	-	0	0
		jumlah pemeliharaan jaringan Fiber	paket	2		2		-		-	-	0	0

		Optik											
		jumlah pemeliharaan jalur CCTV	paket	2		2		-		-	-	0	0
		rapat koordinasi terkait penggunaan jaringan intra	kali	5		5		-		-	-	0	0
		jumlah perjalanan dinas pengecekan troubleshooting jaringan	kali	36		36		-		-	-	0	0
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	unit	4	34,884,561,577	1	4,407,846,409	1	8,565,071,825	1	2,737,595,030	100	31.96
Rata - rata capaian kinerja (%)												230.00	91.06
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

gi													ggi
	Pengelolaan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	- . Jumlah server backup yang di adakan	unit	3	33,463,376,912	1	5,989,824,520	-	1,911,350,300	-	1,852,765,248	0	96.93
		- . Jumlah UPS yang diadakan	unit	2		1		-		-		0	
		- . Jumlah tenaga ahli programmer yang di rekrut	orang	2		2		-		-		0	
		- . Kapasitas server clustering	GB	1,220		986		-		-		0	
		- . Kapasitas server backup data	Tb	24		44		-		-		0	
		- . Kapasitas Backup Listrik	kVa	12		15		-		-		0	

		(UPS)											
		- . Manajemen Data Warehouse/Big Data	paket	1		-		-		-		0	
		- Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	tingkat	13		4		-		-		0	
		- Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	tingkat	15		3		-		-		0	
		- Jumlah OPD yang mengakses data dari Sistem Penghubung Layanan	lembaga	26		5		-		-		0	
		- Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	tingkat	15		5		-		-		0	

		-. Jumlah Kebijakan SPBE yang dievaluasi	pedoman	4		4				-		0	
		-. Jumlah Indikator SPBE yang dievaluasi	indikator	94		94		-		-		0	
		-. Jumlah OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	lembaga	60		56		-		-		0	
		-. jumlah aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi	aplikasi	2		2		-		-		0	
		-. Jumlah Opd yang menerapkan manajemen Layanan SPBE	lembaga	6		6		-		-		0	
		1. Jumlah VPS yang dikelola	buah	585				180		207		115.00	

		2. Jumlah API yang dikelola	buah	66				18		28		155.56	
		1. Jumlah pedoman pelaksanaan SPBE yang disusun dan dievaluasi	pedoman	8		2		2		2.00		100.00	
		2. Jumlah Dokumen Perencanaan SPBE yang dievaluasi	dokumen	8		2		2		2.00		100.00	
		3. Jumlah aplikasi yang difasilitasi pengembangannya menggunakan SDLC (Software Development Life Cycle)	aplikasi	39		5		8		7		87.50	

		4. Jumlah Indikator Evaluasi SPBE yang dipenuhi Data Dukung dan Narasinya	indikator	188		47		47		47.00		100.00	
		-. Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	tingkat	18		3		-		-		0	
		-. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	tingkat	14		2		-		-		0	
		5.Jumlah layanan yang dikelola melalui service desk5.	Layanan	99				31		31.00		100.00	
	Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan				1,904,525,000		418,339,371		176,705,900	-	172,833,582		97.81

	Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota												
		1. Jumlah Kebijakan SPBE yang dievaluasi	pedoman	3	359,525,000	3	348,343,588	-		-	-	0	0
		2. Jumlah Kebijakan SPBE yang disusun	pedoman	1		1		-		-	-	0	0
		3. Jumlah SOP SPBE yang disusun	pedoman	4		4		-		-	-	0	0
		4. Jumlah Rapat Koordinasi SPBE	kali	2		2		-		-	-	0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dokumen	8	1,545,000,000	4	69,995,783	2	176,705,900	2	172,833,582	100	97.81

		Kabupaten/Kota											
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				877,734,000		169,424,750		40,000,000		36,156,027		90.39
		1. Jumlah FGD Penerapan Peta Rencana SPBE	kali	12	329,404,000	12	164,817,750	-	-	-	-	0	0
		2. Jumlah OPD yang difasilitasi dalam Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE	opd	36		76		-		-	-	0	0

		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	dokumen	8	548,330,000	4	4,607,000	2	40,000,000	-	36,156,027	-	90.39
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah				22,557,720,029		566,849,825		196,442,300		187,404,500		95.40
		Jumlah perencanaan Pembangunan media centre	paket	1	3,614,204,447	1	545,784,825		-	-	-	0	0
		Jumlah Pembangunan Ruang Server Baru	paket	1		-		-		-	-	0	0
		Jumlah Pendeteksi suhu ruangan	unit	1		1		-		-	-	0	0

		Jumlah AC central	unit	1		1		-		-	-	0	0
		Jumlah server clustring yang di adakan	unit	2		2		-		-	-	0	0
		Jumlah server backup yang di adakan	unit	1		1		-		-	-	0	0
		Jumlah UPS yang diadakan	unit	1		1		-		-	-	0	0
		Jumlah listrik premium yang diadakan	unit	1		1		-		-	-	0	0
		Jumlah rapat koordinasi terkait pemanfaatan ruang server oleh OPO	kali	10		10				-	-	0	0
		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	unit	4	18,943,515,582	2	21,065,000	1	196,442,300	2	187,404,500	200	95.40
	Pengembangan Aplikasi				2,323,015,380		3,569,761,380		1,190,000,000		1,174,655,099		98.71

	Dan Proses Bisnis Pemerinta hBerbasis Elektronik												
		Jumlah Lisensi Office 365 yang disewa;	lisensi	3	774,703, 380	1	999,572, 244	-	-	-	-	0	0
		Jumlah Lisensi Zoom yang disewa;	lisensi	10		9		-		-	-	0	0
		Jumlah Aplikasi Gresikpedia yang disewa;	bulan	23		23		-		-	-	0	0
		Jumlah Tenaga Ahli Programmer yang direkrut;	orang	2		2		-		-	-	0	0
		Jumlah Portal Layanan Administrasi Pemerintahan yang dibangun/Sewa Aplikasi One	paket	1		1		-		-	-	0	0

		Handling System											
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	aplikasi	39	1,548,312,000	11	2,570,189,136	8	1,190,000,000	7	1,174,655,099	88	98.71
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah				1,259,099,003		331,795,816		89,908,000		74,204,817		82.53
		Jumlah tenaga ahli programmer yang di rekrut	orang	2	160,535,162	2	160,705,500	-	-	-	-	0	0
		Jumlah rapat koordinasi tentang layanan penghubung	kali	4		4		-		-	-	0	0

		Jumlah rapat monitoring database OPD	kali	3		3		-		-	-	0	0
		Jumlah sosialisasi arsitektur data dan informasi	kali	2		2		-		-	-	0	0
		Jumlah perjalanan dinas terkait layanan penghubung di OPD	kali	20		20		-		-	-	0	0
		Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	41	1,098,563,841	14	171,090,316	10	89,908,000	28	74,204,817	280	82.53
	Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten				2,258,051,000		648,551,853		127,756,100		134,295,921		105.12

	/ Kota Cerdas Dan Kota Cerdas												
		1. FGD Penerapan Smart City	kali	14	398,250,000	14	384,270,151	-	-	-	-	0	0
		2. Jumlah Rapat Evaluasi Smart City	kali	5		5		-		-	-	0	0
		Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	dokumen	24	1,859,801,000	6	264,281,702	6	127,756,100	6	124,752,291	100	97.65
	Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan				1,525,200,500		263,941,025		60,538,000		55,049,432		90.93

	Komunika si Pemerinta h Daerah												
		Rapat OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE (4 x 48 OPD)	kali	48	375,200, 500	48	217,562, 225	-			-		0
		Jasa konsultansi Pengelolaan Layanan SPBE	paket	1		1		-		-	-	0	0
		Pembangunan Single sign on	paket	1		1		-		-	-	0	0
		Jumlah Pelatihan Manajemen jaringan OPD	kali	2		2		-		-	-	0	0
		Jumlah Pelatihan Manajemen data	kali	2		2		-		-	-	0	0

		Jumlah Pelatihan Sistem Penghubung layanan	kali	2		2		-		-	-	0	0
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	4	1,150,000,000	1	46,378,800	1	60,538,000	1	55,049,432	100	90.93
	Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE				758,032,000		21,160,500		30,000,000		27,709,500		92.37

		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraa n SPBE	Dokume n	16	758,032,000	4	21,160,500	4	30,000,000	5	27,709,500	125	92.37
Rata - rata capaian kinerja (%)												108.29	96.93
Predikat Kinerja												San gat Ting gi	San gat Tin ggi
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PROGRAM APILKASI INFORMATIKA												134.38	92.13
Predikat Kinerja												San gat Ting gi	San gat Tin ggi
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program Di Urusan Komunikasi dan Informatika					153,431,274,835		42,552,564,643		23,439,745,639		22,414,225,142		
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												111.46	96.32
Predikat Kinerja												San gat Ting	San gat Tin

												gi	ggi
	Urusan Pemerintah Bidang Statistik				4,015,829,000		238,182,772		967,931,181		916,324,753		94.67
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Analisa Data Sektoral yang disusun	persen	133%	4,015,829,000	47% (14/30)	238,182,772	27 %	967,931,181	43%	916,324,753	159	94.67
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	- Jumlah Data Sektoral lingkup OPD yang disusun	data	6	4,015,829,000	3	238,182,772		967,931,181	-	916,324,753	0	94.67
		-. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Satu Data	kali	12		3		-		-		0	

		1. Jumlah OPD yang menyusun atau mengolah data secara terpilah gender	OPD	18		8		4		4.00		100	
		-. Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	tingkat	18		3		-		-		0	
		2.Jumlah OPD yang mengumpulkan data statistik sektoral	buah	135		-		35		43.00		123	
		3. Jumlah Data Induk yang dikelola	buah	12		-		2		2.00		100	
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan ,Pengolahan , Analisis Dan Di Semnasi				2,266,680,000		238,182,772		147,931,181	-	127,312,753	0	86.06

	Data Statistik Sektoral												
		Jumlah Cetakan ke dua Buku DDA / KDA yang diterbitkan BPS Kabupaten Gresik	buah	100	807,853,000	-	131,908,772	-	-	-	-	0	0
		Jumlah rapat pembuatan Kebijakan satu data	kali	6		-		-		-	-	0	0
		Jumlah Sosialisasi tentang data sektoral OPD	kali	1		1		-		-	-	0	0
		Jumlah Sosialisasi tentang Wali data	kali	2		2		-		-	-	0	0
		Jumlah rapat koordinasi data statistik sektoral	kali	4		4		-		-	-	0	0

		Jumlah penyusunan data inflasi Kabupaten Gresik	data	1		1		-		-	-	0	0
		Jumlah penyusunan data analisa bencana Balongpanggang Benjeng Cerme	data	1		1		-		-	-	0	0
		Jumlah penyusunan data NTN dan NTP	data	1		1		-		-	-	0	0
		Jumlah tenaga ahli analis statistik yang di rekrut	orang	1		1		-		-	-	0	0
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi	dokumen	4	1,458,827,000	1	106,274,000	1	147,931,181	1	127,312,753	100	86.06

		Data Statistik Sektoral											
	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				810,000, 000		-		50,000, 000	-		0	
		jumlah OPD yang di beri pelatihan tentang data statistik sektoral	lembaga	48		-	-		-	-		0	

		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	orang	148	810,000,000	-	-	37	50,000,000	49		132	
	Pengembangan Infrastruktur				939,149,000		-		770,000,000	-	763,420,500	0	99.15
		Jumlah Infrastruktur Statistik	unit	8	939,149,000	2		2	770,000,000	2	763,420,500	100	99.15
Rata - rata capaian kinerja (%)												107.62	94.67
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL												159.26	94.67

Predikat Kinerja												San gat Ting gi	San gat Tin ggi
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program Di Urusan Statistik					4,015,82 9,000		238,182 ,772		967,931 ,181		916,324 ,753		
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI URUSAN STATISTIK												159. 26	94. 67
Predikat Kinerja												San gat Ting gi	San gat Tin ggi
	Urusan Pemerinta han Bidang Persandian				6,815,91 0,000		684,179, 899		248,756 ,275		234,909, 366		94.43
	Program Penyelengg araan Persandian Untuk Pengaman an Informasi	Penanganan Serangan Cyber	persen	600%	6,815,91 0,000	300 %	684,179, 899	100 %	248,756 ,275	114 %	234,909, 366	114 .00	94.43

	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Infomasi Pemeintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase OPD yang Menerapkan Manajemen Keamanan Informasi	persen	502%	6,815,910,000	202 %	684,179,899	-	248,756,275	-	234,909,366	0	94.43
		1. Jumlah OPD yang menerapkan management keamanan informasi	lembaga	27		-		6		6.00	-	100.00	0
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaa n Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerinta h Daerah				1,175,391,894		146,563,000		9,452,000		9,425,282.00		99.72

	Kabupaten /Kota												
		jumlah OPD yang diberikan pelatihan tentang keamanan informasi	lembaga	58	103,326,000	58	137,943,000	0		-	-	0	0
		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	laporan	4	1,072,065,894	1	8,620,000	1	9,452,000	1	9,425,282.00	100	99.72
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah				5,640,518,106		537,616,899		239,304,275	-	225,484,084.00	0	94.22

	h Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik												
		Jumlah Firewall yang digunakan untuk keamanan jaringan	Unit	1	286,477, 000	1	446,281, 753	0	-	-	-	0	0
		Jumlah Pengamanan yang digunakan untuk mengamankan transmisi data antar dua sistem yang berbeda	paket	2		2		0		-	-	0	0
		Jumlah user Antivirus	user	75		75		0		-	-	0	0
		Jumlah tenaga ahli untuk penanganan insiden	orang	3		3		0		-	-	0	0

		keamanan yang di rekrut											
		Jumlah maintanance email gresikkab.go.id	paket	1		1		0		-	-	0	0
		Jumlah Sosialisasi arsitektur keamanan informasi	kali	2		2		0		-	-	0	0
		Jumlah Sosialisasi Digital Signature	kali	2		2		0		-	-	0	0
		Jumlah pelatihan penggunaan Digital Signature	kali	5		5		0		-	-	0	0
		Jumlah evaluasi penggunaan Digital Signature	kali	2		2		0		-	-	0	0

		Jumlah Perjalana Dinas terkait penanganan keamanan infomasi	kali	37		37		0		-	-	0	0
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan	4	5,354,041,106	1	91,335,146	1	239,304,275	1	225,484,084.00	100	94.22
Rata - rata capaian kinerja (%)												100.00	94.43
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI												114.00	94.43
Predikat Kinerja												Sangat	Sangat

								Ting gi	Tin ggi
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program Di Urusan Persandian	6,815,91 0,000		684,179 ,899		248,756 ,275		234,909 ,366		
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI URUSAN PERSANDIAN								114. 00	94. 43
Predikat Kinerja								San gat Ting gi	San gat Tin ggi

2.2. Analisis Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kelembagaan dan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik.

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi dan informasi.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat guna terbentuknya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.
3. Menyediakan layanan administrasi perkantoran berbasis elektronik yang tertata dan handal serta meningkatkan mutu layanan publik dan layanan pemerintahan.
4. Mengintegrasikan aplikasi sistem informasi dan basis data yang terkoneksi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan portal layanan masyarakat mudah diakses.

Dalam rangka mengoptimalkan dan memaksimalkan tugas dan fungsi kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika maka dilakukan perubahan indikator sasaran dengan melakukan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2021-2026, alasan dilakukan perubahan indikator adalah sebagai berikut :

- sesuai Permen PANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, dimana dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026, nilai

indeks SPBE menjadi salah satu indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Gresik.

- Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan cascading dengan cara mengambil tingkat kematangan indikator SPBE sebagai indikator kinerja utama. Hal ini menyulitkan dalam melakukan pengukuran berkala (bulanan atau triwulanan) karena tingkat kematangan hanya bisa diukur oleh kementerian PANRB yang hasilnya keluar pada awal tahun berikutnya
- Indikator kinerja perangkat daerah seharusnya dinilai oleh Kepala Daerah, bukan Kementerian
- sesuai Permen PANRB No. 89 Tahun 2021 dijelaskan bahwa indikator harus memenuhi kriteria SMART, bersifat Spesifik (tidak bias) dan Measurable (memiliki ukuran kuantitatif) sedangkan tingkat kematangan merupakan ukuran kualitatif.

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gresik

Indikator	Bidang penanggung jawab	Baseline	Target Renstra (perubahan) SKPD --- Kemendagri 050				Realisasi		Catatan Penting
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
INDIKATOR KINERJA TUJUAN RENSTRA/SASARAN RPJMD									
Indeks SPBE	Diskominfo	2.55	3.65	3.86	4.03	4.13	4.28	4.28	4.13
IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)									
1. Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Yang disediakan	Bidang Statistik dan Informasi Publik								Tahun 2024 terdapat perubahan indikator sasaran renstra
1. Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik		3	4				5		
2. Pertumbuhan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang disediakan		50 informasi	10% ~ 55 dari 50				46%~ 73 dari 50		

			informasi				informasi		
3. Pertumbuhan konten edukasi yang dipublikasikan		1056 konten edukasi	2% ~ 1077 dari 1056 konten edukasi				9%~ 1150 dari 1056 konten edukasi		
2. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Bidang Teknologi Informatika								Tahun 2024 terdapat perubahan indikator sasaran renstra
1. Persentase perangkat daerah yang terlayani infrastruktur TI		0%	25%				97.22% (70 OPD / 72 OPD)		
3. Meningkatnya Tingkat Kematangan kapabilitas proses SPBE	Bidang SPBE								Tahun 2024 terdapat perubahan indikator sasaran renstra
1. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE		4	5				4		
2. Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE		3	3				3		
4. Meningkatnya Data Statistik Sektor yang disediakan	Bidang SPBE								Tahun 2024 terdapat perubahan

1. Pertumbuhan Analisa Data Sektoral yang disediakan		4 (tahun 2022)	2 analisa (50%) ~ 6 dari 4 analisa data sektoral				4 analisa (100%) ~ 8 dari 4 analisa data sektoral		indikator sasaran renstra
5. Meningkatnya keamanan sistem elektronik	Bidang SPBE								Tahun 2024 terdapat perubahan indikator sasaran renstra
1. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi		1	3				3		
Indikator	Bidang penanggung jawab	Baseline	Target Renstra (perubahan) SKPD --- Kemendagri 900.1				Realisasi		Catatan Penting
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024 s/d TW II	
IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)									
1. Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Yang disediakan	Bidang Statistik dan Informasi								Indikator baru pada sasaran renstra

1. Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	Publik	92.1%		92.2%	92.3%	92.4%		95.5%	
2. Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan		121		131	141	151		210	
3. Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan		1800		1810	1820	1830		1794	
2. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Bidang Teknologi Informatika								Indikator baru pada sasaran renstra
Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data		75% (6.570 jam dari 8.760 jam)		80% (7.008 jam dari 8.760 jam)	85% (7.446 jam dari 8.760 jam)	90% (7.884 jam dari 8.760 jam)		99,60 % (8611 jam dari 8.760 jam)	
3. Meningkatnya Tingkat Kematangan kapabilitas proses SPBE	Bidang SPBE								Indikator baru pada sasaran renstra
1. Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi		100%		100%	100%	100%		87%	

2. Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah		75%		75%	75%	75%		25%	
4. Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang disediakan	Bidang SPBE								Indikator baru pada sasaran renstra
Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan		0		4 rekom	4 rekom	4 rekom		2 rekom	
5. Meningkatnya keamanan sistem elektronik	Bidang SPBE								Indikator baru pada sasaran renstra
Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi		18		30	40	58		16	

Sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi”.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 5 (lima) sasaran strategis Dinas Komunikasi Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan

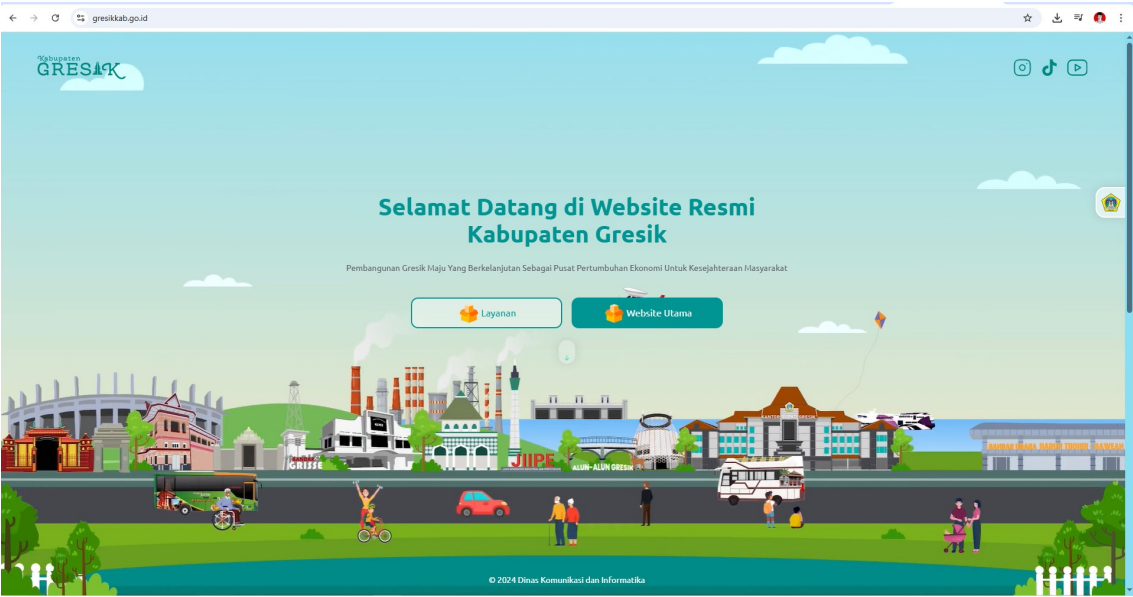
Pada sasaran strategis 1, “Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan” memiliki 3 indikator kinerja, dengan semua indikator tercapai.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAI AN
Meningkatnya Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	92.2%	97.1%	105%
	Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	131 Informasi dan Dokumentasi	213 Informasi dan Dokumentasi	162%
	Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	1810 Konten Positif	3362 Konten Positif	185%

Saat ini, keterbukaan informasi memberikan dampak besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gresik, sehingga penyebarluasaan informasi harus lebih dioptimalkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik

membentuk satu wadah internal yang diberi nama Gresik News Room, yang bertujuan untuk menjaring informasi terupdate, serta menyaring berita hoax terkait kegiatan pemerintahan. Saat ini masyarakat, terutama kaum milenial memiliki berbagai pilihan untuk mengakses layanan informasi yang disediakan oleh pemerintah seperti website Kabupaten Gresik (gresikkab.go.id), akun IG [@pemkabgresik](https://www.instagram.com/pemkabgresik), youtube [suaragresik](https://www.youtube.com/suaragresik), akun FB Pemerintah Kabupaten Gresik, Tiktok [@pemkabgresik](https://www.tiktok.com/@pemkabgresik).

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2024 guna mencapai sasaran strategis ke-1 adalah sebagai berikut :



Website gresikkab.go.id

Youtube Suara Gresik

Facebook Pemerintah Kabupaten Gresik



pemkabgresik

Follow Message

3,756 posts 31.9K followers 235 following

Pemerintah Kabupaten Gresik

[pemkabgresik](#)

Digital creator
Instagram Resmi Pemerintah Kabupaten Gresik
Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika @kominfogresik
📍 Website Resmi Pemkab Gresik 📍
🌐 gresikkab.go.id/home + 1

POSTS REELS TAGGED







Instagram @pemkabgresik



pemkabgresik

Follow Message ...

5,702 posts 41.6K followers 239 following

Pemerintah Kabupaten Gresik

[pemkabgresik](#)

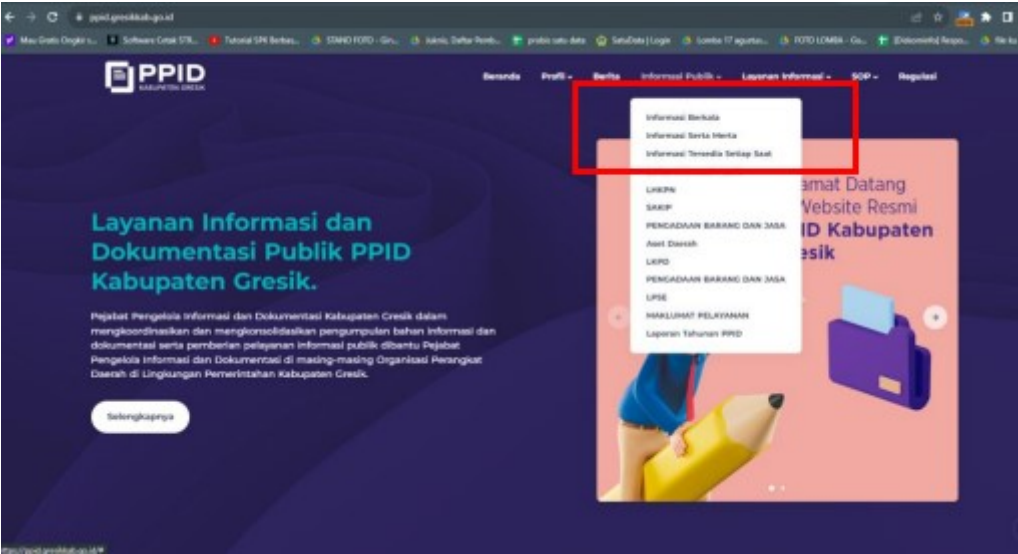
Government Official
Instagram Resmi Pemerintah Kabupaten Gresik
Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika @kominfogresik
📍 Website... more
🌐 gresikkab.go.id/home

Followed by [hestyhapsari](#), [nopsaka](#) + 34 more

Grid of posts:

- Post 1: Juara 1 CHAMPIONS
- Post 2: Tinjau Kesiapan Sekolah Rakyat, Bupati Gresik Pastikan Semua Fasilitas Siap, Wujudkan Lulusan Unggul dan Bertalenta
- Post 3: Juara 4 Kejuaraan Bola Voli Kapolres Gresik Cup 2025 Resmi Ditutup, Bupati Gresik Apresiasi Sportivitas dan Semangat Olahraga
- Post 4: Pemberitahuan MOHON MAAF

Tiktok @pemkabgresik



Website ppid.gresikkab.go.id

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)

Pada sasaran strategis 2, “Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data, dan tercapai 112% dengan realisasi 90.25% dari target 80%

Layanan yang dilakukan di tahun 2024 guna mencapai sasaran strategis ke-2 adalah sebagai berikut :



Pengecekan jaringan intra di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE

Pada sasaran strategis 3, memiliki 2 indikator kinerja. Tingkat kinerja pada Sasaran Strategis 3 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISAS I	CAPAIAN
Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	100%	100%	100%
	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	75%	75%	75%

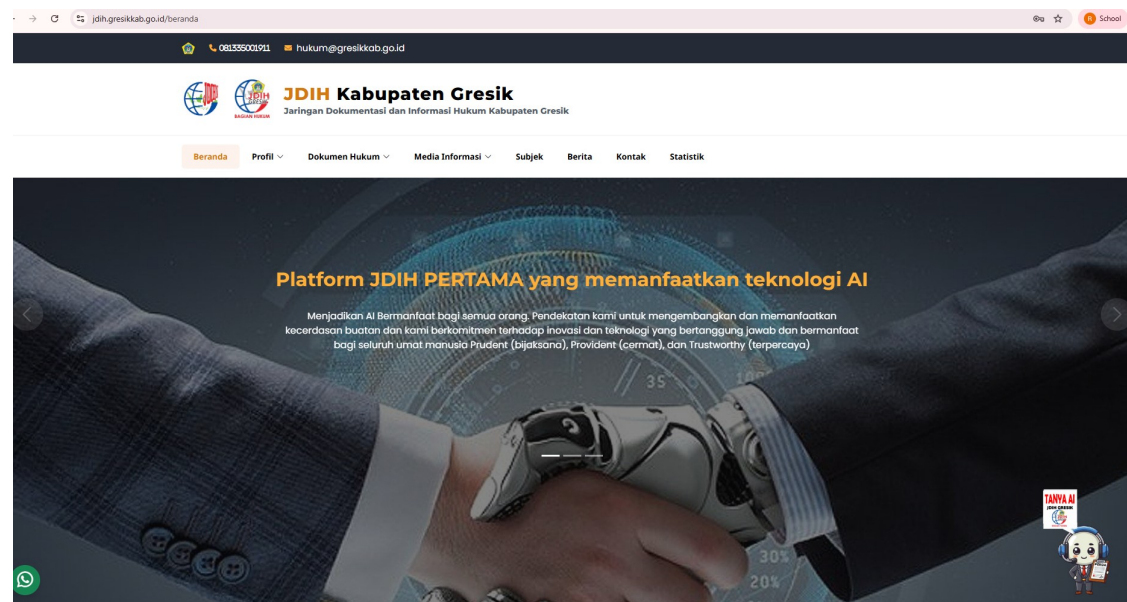
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2024 guna mencapai sasaran strategis ke-1 “Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE” adalah sebagai berikut :



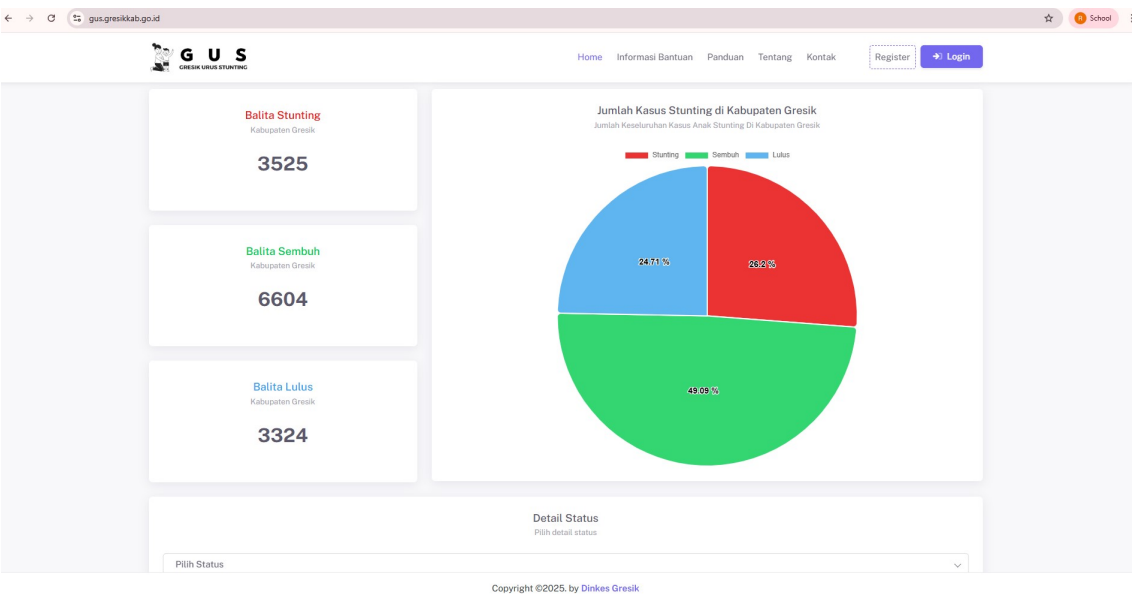
Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Service Desk



Dokumentasi Rapat Monev Kinerja Tim Koordinas SPBE



Tampilan menu website <https://jdi.h.gresikkab.go.id/>



Tampilan Aplikasi GUS

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan

Pada sasaran strategis 4, memiliki 1 indikator kinerja, dengan tingkat capaian 25%.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang disediakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan	4 rekomendasi	4 rekomendasi	100%

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2024 guna mencapai sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :



Kegiatan Pendampingan Pengisian dan Verifikasi Data pada Aplikasi SIPD E-Walidata



Desk Romantik dan Penyusunan Metada Statistik

**SASARAN
STRATEGIS 5**

Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik

Pada sasaran strategis 5, “Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik” memiliki 1 indikator kinerja dengan tingkat capaian 100%.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISAS I	CAPAIAN
Meningkatnya keamanan sistem elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	30 aplikasi	30 aplikasi	100%

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik mendukung fasilitas antara lain :

- a. Penyediaan, Pengelolaan Sistem Informasi melalui media elektronik dalam bentuk Domain Situs Web Pemerintah Kabupaten Gresik maupun Sub Domain yang dikelola oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah hingga Kecamatan dan Kelurahan. Hal ini merupakan salah satu program dalam melaksanakan pengembangan *e-Government* dengan sasaran agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses informasi dan layanan pemerintahan, serta ikut berpartisipasi di dalam pembangunan dengan menggunakan media internet.
- b. Layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap Penyelenggara pelayanan publik yang dibentuk untuk mendorong “*no wrong door policy*” untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun & jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang. Dinas Komunikasi dan Informatika atas nama Pemerintah daerah Kabupaten Gresik berperan melakukan monev pengelolaan pengaduan kepada seluruh Unit Kerja dengan dapat melibatkan APIP sebagai pengawas internal
- c. Fasilitasi Pengintegrasian Aplikasi pendukung kinerja atau Sistem Informasi Manajemen (SIM) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- d. Layanan *Maintenance*, Penyediaan Jaringan komputer dan Internet. Komputer dan jaringan internet adalah produk teknologi yang rentan gangguan serta kerusakan. Oleh karena itu diperlukan mekanisme pemeliharaan komputer dan pengecekan jaringan secara berkala.
- e. Fasilitasi akses koneksi internet dan intranet bagi seluruh institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai ke tingkat Desa dan Kelurahan agar dapat meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- f. *Collecting data* dan *security data* agar seluruh informasi yang dibutuhkan baik untuk institusi pemerintah maupun masyarakat dapat terkendali dalam satu sistem data center serta menghasilkan data dan informasi yang *uptodate*/terkini dan *real time*. Dinas Komunikasi dan Informatika meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan cara memanfaatkan teknologi informasi untuk masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat dan mempersiapkan media layanan Media Center.
- g. Kemudian dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat guna terbentuknya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menyajikan informasi tersebut dalam bentuk website atau portal. Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan perangkat operasional hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas agar mekanisme komunikasi antar SKPD berjalan efektif dan efisien.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Hambatan/permasalahan dapat diidentifikasi antara lain :

- Masih belum optimalnya cakupan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi
- Masih banyak sistem informasi dan database perangkat daerah yang belum terintegrasinya
- Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
- Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK
- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur TIK, terutama infrastruktur berbasis FO

- Banyaknya panggilan darurat dari masyarakat yang menyalahgunakan NTPD 112
- Gresik belum memiliki *Complaint Handling System* desa yang berbasis Teknologi Informasi
- Akses internet dan telekomunikasi masyarakat belum merata di beberapa ruang publik dan terdapat area yang masih *blankspot*
- Masih belum maksimalnya layanan publik berbasis elektronik
- Kurang tersedianya Pedoman Tata Kelola dan Manajemen SPBE
- Proses Penganggaran SPBE Belum Terkoordinasi
- Dalam bidang SPBE masih terdapat beberapa hal yang masih minim dan belum maksimal dalam penerapannya misalkan : 1. manajemen SPBE, 2. Audit SPBE, 3. SDM Pengelola SPBE
- Teknologi yang sangat cepat berkembang : Industri 4.0 ->Artificial Intelligence, Big Data, Internet Of Thing
- Kurangnya Peran Perangkat Daerah dalam Penerapan SPBE
- Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi
- Kurangnya kesadaran perangkat daerah terhadap data yang dapat dipublikasikan
- Masih rendahnya tingkat keamanan pengelolaan informasi dan data
- Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilandaskan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
- Sulitnya mendapatkan data dengan jenis dan kedalaman tertentu, karena keterbatasan kewenangan serta belum tersedianya Regulasi tentang Satu Data
- Kegiatan Rakor rencana perubahan perda telekomunikasi bersama pada kegiatan fasilitasi sarana komunikasi daerah tidak tercapai dikarenakan adanya pandemi covid-19
- Masih adanya kesenjangan pemanfaatan Teknologi Informasi (*Digital Divide*) antara Desa dan Kota menyebabkan belum optimalnya penyebar luasan informasi kepada masyarakat

2.3.2. Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026, Tugas dan Fungsi Diskominfo termasuk dalam Misi ke-1 yaitu *Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel serta mewujudkan Kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif*. Dalam rangka pencapaian misi pertama di atas maka ditetapkan Tujuan ke-1 yaitu “*Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas berdasarkan Good and Clean Governance*”, tujuan ke-1 tersebut dijabarkan dalam sasaran pembangunan Sasaran ke-1 sebagai berikut : “*Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Akuntabel dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi*” dengan indikator kinerja yang diampuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah *Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik*. Penyelarasan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan serta penetapan indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dijabarkan ke dalam rumusan sebagaimana berikut : Pemetaan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

No	Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
				Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Tujuan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

No	Misi RPJMD	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Target Indikator						Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Menciptakan Tata Kelola	Menghadirkan Tata Kelola	S.1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan	2,55	3,01	3,19	3,65	3,86	4,03	4,13	4,13

Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif	Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan <i>Good and Clean Governance</i>	yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Berbasis Elektronik
---	---	---	---------------------

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Terdapat 3 Domain, 7 Aspek dan 35 Indikator dalam penilaian SPBE sesuai dengan PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Target Capaian Indeks SPBE Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah 3,86 dan terealisasi sebesar 4,32. Dengan demikian capaian Indeks SPBE Kabupaten Gresik adalah 111.92%.

2.3.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Adapun tantangan dalam pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik antara lain :

- a. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik, baik dampak positif maupun dampak negatif sehingga perlu dilakukan sosialisasi terkait hal tersebut.
- b. Ketersediaan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi yang masih sangat terbatas dan kurang merata di wilayah pemerintahan Kabupaten Gresik.
- c. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap teknologi, informasi dan komunikasi, sehingga masih terjadi kesenjangan pemahaman informasi di masyarakat.
- d. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur Pemerintah Daerah.
- e. Belum optimalnya keamanan pengelolaan data informasi.
- f. Terbatasnya kecepatan koneksi internet di wilayah pemerintahan kabupaten Gresik.
- g. Kurangnya minat masyarakat untuk mempelajari pengetahuan IT.

Sedangkan peluang yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam pengembangan pelayanan antara lain :

- a. Komitmen kepala daerah untuk mendukung program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
- b. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- c. Tersedianya media teknologi informasi dan komunikasi untuk didayagunakan.
- d. Kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Meningkatnya sistem keamanan informasi bersifat rahasia yang memanfaatkan teknologi informasi.
- f. Pesatnya perkembangan teknologi memungkinkan segera terciptanya Program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2.3.4. Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Beberapa rekomendasi yang dilakukan dalam perumusan program kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :

- Peningkatan kapabilitas sumber daya manusia pengelola IT sampai tingkat operator di lingkungan pemerintahan dengan cara Fasilitasi dan Pendampingan.
- efisiensi dan efektifitas dalam kinerja dan pelayanan publik dalam bidang IT antara lain mencakup Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan Berbasis Elektronik, infrastruktur, aplikasi dan kelembagaan pada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Gresik
- Fasilitasi dan koordinasi terkait pengaduan yang masuk kepada OPD penyelenggara pelayanan publik yang mengampuh/berwenang.
- monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan kepada seluruh Unit Kerja penyelenggara pelayan publik dengan melibatkan APIP sebagai pengawas internal
- Menyusun regulasi tentang keamanan informasi berdasarkan peraturan perundangan dan perkembangan teknolog

- Melaksanakan pembangunan teknologi informasi yang terintegrasi antar satu perangkat daerah dengan yang lainnya.
- Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi dan GIS, yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.
- Mengembangkan inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Mengoptimalkan pembangunan sistem komunikasi di area *blankspot*.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Meningkatkan Aksesibilitas telekomunikasi dan internet dengan menggunakan CSR atau bekerja sama *tower provider* dan *telco operator*.

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diiringi dengan derasnya arus informasi dapat membuat efek negatif bagi publik apabila tidak disertai dengan pengendalian akses informasi dan keamanan sistem. Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan di semua bidang. Beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

- a. Belum Teranggarkan Lisensi, Sewa Cloud dan Pengembangan IOP khususnya Pemetaan dan Penggunaan Google Gemini AI untuk pemangku kepentingan
- b. Guna meningkatkan indeks SPBE sesuai dengan Target RPJMD maka diperlukan fasilitasi dari Program Kerja Tim Koordinasi SPBE Kab Gresik;
- c. Pengembangan Aplikasi GRESIKPEDIA diperlukan untuk mengakomodasi dari keberlanjutan Nawakarsa dan upaya peningkatan pengguna dengan sosialisasi dan merchandise;
- d. Untuk meningkatkan capaian Domain Layanan pada Indikator 32 – 47 pada Indeks SPBE diperlukan Fasilitasi Monev terhadap seluruh layanan serta meindaklanjuti dari Rekomendasi saat disampaikan hasil

Monev oleh Asesor Eksternal KemenpanRB pada saat Wawancara penilaian Indeks SPBE bulan Oktober dipimpin Sekda

- e. Adanya kebutuhan untuk penarikan Jaringan Intra Pemerintah ke MPP baru di Bunder
- f. Penambahan beberapa CCTV untuk menambah pengawasan di wilayah Pemkab Gresik (4 Titik) yang terintegrasi dengan Command Center
- g. Peningkatan Kapasitas Server di Ruang Server Pemkab Gresik di Kantor Bupati sebagai Langkah antisipasi jika terjadi masalah di PDN serta untuk Back Up data dari PDN, mengingat pernah terjadi masalah di PDN sehingga mengganggu layanan aplikasi di Pemkab Gresik (Juni 2024);
- h. Dalam rangka tindak lanjut ISO 27001 diperlukan adanya penguatan Pengamanan Sistem dengan mengadakan Firewall yang sesuai dengan kapasitas bandwidth serta menjaga Jaringan Intra Pemerintah serta webserver lebih aman dari serangan malware/ransomware dan untuk dapat mengatasi penggunaan Judi Online di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Serta untuk dapat membantu CSIRT untuk patrol cyber di website dan aplikasi dengan subdomain gresikkab.go.id
- i. Banyaknya berita negatif yang menyerang Pemerintah
- j. Berkembangnya berita/info hoax di media sosial, Misalkan tentang Isu social berita hoaks
- k. Inkonsistensi data statistik yang dihasilkan oleh Produsen Data
- l. Data statistik yang disajikan belum memenuhi prinsip Satu Data Indonesia

Ke depannya, pengembangan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Gresik tidak hanya terbatas pada lingkup internal Pemerintahan saja, namun akan diterapkan lebih luas sesuai dengan konsep GRESIK SMART CITY. Konsep ini akan menempatkan Kabupaten Gresik sebagai kota cerdas sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan pengembangan ekonomi daerah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa terkait dengan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, maka Pemerintah perlu menaruh perhatian khususnya mengenai informasi yang wajib dibuka untuk publik, informasi yang dikecualikan, dan juga mekanisme penanganan sengketa informasi. Pemerintah Kabupaten Gresik juga harus memperhatikan penyelenggaraan *website*, konten, Sumber Daya Manusia serta infrastrukturnya.

Selain itu juga berpedoman pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpres No. 95/2018 tentang SPBE. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa terdapat beberapa urusan, salah satunya adalah urusan komunikasi dan informatika yang menangani masalah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain serta Pengelolaan *e-Government*.

Pemerintah dapat menggunakan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada publik serta diwajibkan memberikan ruang informasi seluas-luasnya bagi publik yang kini menjadi kebutuhan dan semakin kritis terhadap Pemerintah.

Penjabaran Program Nasional, Pembangunan yang berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan (UU No. 32/2009).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik terkait dengan Pembangunan Ekonomi, melalui publikasi isu strategis pemerintah Kabupaten Gresik dan upaya

penanganannya. Mendukung capaian prioritas daerah dalam Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan. Selain itu tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah meningkatkan *awareness* masyarakat, khususnya terkait isu strategis penanggulangan kemiskinan, dimana salah satu indikatornya adalah *stunting*. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain, mengupdate isi website gresikkab.go.id, membuat flyer edukasi, aktif dalam pemberitaan media sosial pemerintahan (youtube, IG, Facebook dan twitter), siaran radio suara gresik.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, perlu ditetapkan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program secara umum serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program yang telah ditetapkan.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Gresik untuk periode RPJMD Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

“Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatannya. Hal

ini dimaksudkan agar arah setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan dapat menciptakan keadaan yang membuat kehidupan masyarakat berlangsung efektif serta memiliki peran penting untuk memberikan pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029, Tugas dan Fungsi Diskominfo termasuk dalam Misi ke-3 yaitu *“Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”* dan Misi ke-4 yaitu *“Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat”*. Dalam rangka pencapaian misi di atas maka ditetapkan :

- Tujuan ke-3 yaitu *“Terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang berkelanjutan”* diukur dengan indikator Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Tujuan ke-3 tersebut dijabarkan dalam sasaran pembangunan Sasaran ke-2 sebagai berikut : *“Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing”* dengan indikator kinerja *Indeks Daya Saing Daerah*.
- Tujuan ke-4 yaitu *“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas, Inovatif, Akuntabel, dan Melayani”* diukur dengan indikator indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan ke-4 tersebut dijabarkan dalam sasaran pembangunan Sasaran ke-2 sebagai berikut : *“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”* dengan indikator kinerja yang diampuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah *Indeks Pemerintahan Digital*.

Untuk mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan bahwa tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah : *“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital Yang Adaptif dan Transparan”*. dengan Indikator : *Indeks Pemerintahan Digital* yang sebelumnya menggunakan *Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik* berdasarkan surat dari KEMENPAN RB RI nomor : B/66/PD.02/2025 tentang Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada tahun 2025 dalam rangka penerapan kebijakan

pemerintah digital sebagai penguatan kebijakan SPBE yang mana instrumen dan nomenklatur indeks SPBE dan Indeks Pemdi berbeda.

Sasaran strategis Dinas merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi yang lebih optimal, Dinas Komunikasi dan Informatika merumuskan dari 4 (empat) sasaran 5 (lima) indikator kinerja yang kemudian dilanjutkan kedalam Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk melaksanakan 3 (tiga) urusan pemerintah yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan pesandian.

Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya digitalisasi Layanan
- Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi
- meningkatnya implementasi Persandian pada digitalisasi layanan
- Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik

Adapun Tujuan dan sasaran Rencana Kerja sesuai Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik disajikan dalam tabel berikut

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Diskominfo Tahun 2026

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	IK D RP JMD	IK K RP JMD	IUP	Target 2026	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	10	15
NSPK : ● pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; ● pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi serta evaluasi, dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital Yang Adaptif dan Transparan		Indeks Pemerintah Digital (Angka)	√		√	1.79 -2.1	Tahun 2024-2025 menggunakan indeks SPBE dilanjutkan dg indeks Pemerintah Digital mulai tahun 2026-2029 berdasarkan surat KEMENPAN RB RI nomor : B/66/PD.02/2025 tentang Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada tahun 2025. Penentuan angka target indeks

ka, statistik dan persandia n; Sasaran : - meningka tkan tata kelola pemerint ahan yang adaptif dan transpara n melalui transform asi digital, penguata n kolaboras i lintas sektor, serta pengelola an SDM aparatur berbasis sistem merit								SPBE tahun 2025 didasarkan pada SE Sekda Propinsi Jatim tentang Pemutakhir an Penyelaras an Indikator Sasaran Pembangun an dan IUP pada RPJMD Kabupaten /Kota Tahun 2025-2029 Nomor : 000.7.2.2/ 14233/201 .2/2025
		Meningkat nya digitalisasi Layanan	Persentase digitalisasi layanan (%)	√	√		45	
		meningkat nya implement asi Persandia n pada	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan Persandian	√	√		20	

		digitalisasi layanan	(%)					
		Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik	Persentase Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik yang Menggunakan Data Statistik Sektorial dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (%)	√	√		100	
		Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi	Nilai keterbukaan informasi publik (Nilai)	√	√		45	
			persentase pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan (%)	√	√		97,1	

3.3. Program dan Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2026 telah mempertimbangkan beberapa faktor antara lain :

1. memiliki kontribusi pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu :
 - a. 17.6.1 Meningkatnya persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)
2. Mendukung prioritas pembangunan nasional Misi Asta Cita, yaitu :
 - a. Ke – 7, Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
 - b. Ke – 3, Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3. Mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur, yaitu :
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan anti korupsi
 - b. Pengembangan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan
4. Mendukung prioritas pembangunan tematik Kabupaten Gresik, yaitu :
 - a. Gresik Tuntas : *Gresik Integrated Smart System (GISS)* yaitu sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data Pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk Big Data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik demi terciptanya transparansi tata Kelola pemerintahan daerah (*One Data, One Portal, and*

: *Open Access*).

- b. Gresik Mapan Gresik Kota Santri 4.0 yaitu Pembangunan Kota Modern yang terintegrasi dengan *Gresik Integrated Smart System (GISS)*

Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2026 didasarkan pada Surat Edaran Bupati Gresik nomor : 050/101/437.71/2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026

Tahun 2026 terdapat 5 program 12 kegiatan 38 sub kegiatan dengan total nilai pagu indikatif sebesar Rp. 16.323.349.478,00

Berikut disajikan rancangan Awal Renja tahun 2026 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik sebagai berikut :

Table 2.7 (T-C.33)
Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Gresik
Dinas Komunikasi dan Informatika

N o.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Pagu Indikatif 2026 sesuai SE (Rp. 000)	Lokasi	Sumbe r Dana	Target	Kebutuhan Dana (Rp.000)
	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			16,323,349, 478				45,418,215, 126
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			16,203,841, 078				40,970,160, 126
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	6,973,587,2 38			100%	10,656,396, 126

	KOTA							
	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase fasilitasi dan kooordinasi penyusunan dokumen/laporan perencanaan dan capaian kinerja SKPD	100%	10,180,000			100%	17,000,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,980,000	Diskomi nfo	APBD	1 Dokumen	15,000,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4,200,000	Diskomi nfo	APBD	12 Laporan	2,000,000
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase ketersediaan gaji dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan SKPD	100%	5,919,334,9 79			100%	6,596,180,6 12
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang/12 bulan	5,917,498,9 79	Diskomi nfo	APBD	34 orang/12 bulan	6,586,180,6 12

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	-	Diskominfo	APBD	1 laporan	5,000,000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 laporan	1,836,000	Diskominfo	APBD	12 laporan	5,000,000
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		persentase fasilitasi ketersediaan operasional dan administrasi umum perangkat daerah	100%	177,763,059			100%	1,555,425,131
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,717,600	Diskominfo	APBD	1 Paket	33,292,900
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65,156,199	Diskominfo	APBD	1 Paket	720,176,000

8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4,981,700	Diskominfo	APBD	1 Paket	33,000,000
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,723,700	Diskominfo	APBD	1 Paket	169,205,000
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16,491,200	Diskominfo	APBD	2 Paket	177,000,000
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	715,400	Diskominfo	APBD	4 Dokumen	19,310,000
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	53,977,260	Diskominfo	APBD	40 Laporan	403,441,231
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Jpersentase ketersediaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-			100%	324,890,983
13	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	-	Diskominfo	APBD	20 Unit	324,890,983
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		persentase fasilitasi ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	772,589,200			100%	1,183,404,258

14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	191,301,200	Diskominfo	APBD	5 Laporan	384,611,000
15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	16,810,000	Diskominfo	APBD	3 Laporan	175,993,258
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Laporan	564,478,000	Diskominfo	APBD	19 Laporan	622,800,000
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	persentase fasilitasi ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	93,720,000			100%	979,495,142
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit (7 unit R-4, 1 unit R-2)	93,720,000	Diskominfo	APBD	8 Unit (7 unit R-4, 1 unit R-2)	350,000,000
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	-	Diskominfo	APBD	1 Unit	629,495,142

	Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi					
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1. Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi	100%	4,724,518,8 00		100%	9,730,433,0 00
		2. Presentase jenis informasi publik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi	100% (3/3)			100% (3/3)	
		3. Presentase permintaan data yang difasilitasi PPID	100%			100%	
	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Persentase OPD yang menindaklanjuti pengaduan tepat waktu	95.7%	4,724,518,8 00		95.7%	9,730,433,0 00
		2. Persentase panggilan kedaruratan yg ditindaklanjuti	100%			100%	
		3. Jumlah OPD yang menyediakan Daftar informasi dan dokumentasi publik	11			9	
		4. Jumlah konten informasi pemerintah yang dipublikasikan	2800			2800	

19	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 laporan	3,247,922,000	Kab. Gresik	APBD	2 Komunitas	5,750,000,000
20	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas	34,367,500.00	Kab. Gresik	APBD	2 Komunitas	300,000,000
21	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 Permohonan	25,965,500	Kab. Gresik	APBD	1 Permohonan	315,000,000
22	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	24 rekomendasi (12 rekomendasi pengaduan dan 12 rekomendasi call	574,040,000	Kab. Gresik	APBD	24 rekomendasi (12 rekomendasi pengaduan dan 12 rekomendasi call	1,285,433,000

			centre)				centre)	
23	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	16 Media	820,528,300	Kab. Gresik	APBD, DBHC HT	16 Media	1,400,000,000
24	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	600 Konten	21,695,500	Kab. Gresik	APBD	562 Konten	355,000,000
25	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	130 Orang	-	Kab. Gresik	APBD	130 Orang	325,000,000
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1 Persentase OPD yang menerapkan management Aset TIK	75%	4,505,735,040			75%	20,583,331,000
		2. Presentase OPD yang memanfaatkan ruang server	31% (15 OPD/48 OPD)				29%	

		3. Persentase OPD yang Menggunakan Sistem Penghubung Layanan	100%				75%	
		1. Persentase Dokumen Kebijakan yang dievaluasi	100% (3/3)				100% (3/3)	
		2. Persentase Indikator SPBE yang dievaluasi	100% (47/47)				100% (47/47)	
		3. Persentase aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi	100% (15/15)				73% (11/15)	
		4. Persentase OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	100%				100%	
		5. Persentase OPD yang menerapkan Manajemen Layanan SPBE	100%				100%	
	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah	8.234 jam (94% dari 8.760 jam)	3,723,751,740			8.052 jam (92% dari 8.760 jam)	20,583,331,000
		2. Jumlah OPD yang dibina untuk menerapkan manajemen Aset TIK	20				15	
		3. Jumlah VPS yang dikelola	210 VPS	781,983,300			195 VPS	20,583,331,000
		4. Jumlah API yang	26 API				22 API	

		dikelola						
		1. Jumlah pedoman pelaksanaan SPBE yang disusun dan dievaluasi	2				2	
		2. Jumlah Dokumen Perencanaan SPBE yang dievaluasi	2				2	
		3. Jumlah Indikator Evaluasi SPBE yang dipenuhi Data Dukung dan Narasinya	47				47	
		4. Jumlah aplikasi yang difasilitasi pengembangannya menggunakan SDLC (Software Development Life Cycle)	15				11	
		5. Jumlah layanan yang dikelola melalui service desk	35				33	
26	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	100 Aplikasi	36,966,700	Kab. Gresik	APBD	100 Aplikasi	6,869,550,288

27	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	4 Laporan	21,750,450	Kab. Gresik	APBD	4 Laporan	800,000,000
28	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen	115,882,000	Kab. Gresik	APBD	1 Dokumen	200,000,000
29	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	3 Dokumen	54,122,950	Kab. Gresik	APBD	3 Dokumen	400,000,000
30	Koordinasi Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE serta pemanfaatan aplikasi umum SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	15 Aplikasi	540,172,100	Kab. Gresik	APBD	15 Aplikasi	850,000,000

31	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	30 Aplikasi	22,298,500	Kab. Gresik	APBD	30 Aplikasi	353,202,997
32	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	28 Perangkat daerah	50,055,800	Kab. Gresik	APBD	28 Perangkat daerah	542,301,000
33	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	46 Perangkat Daerah	3,664,486,540	Kab. Gresik	APBD	46 Perangkat Daerah	10,568,276,715
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				62,940,400				1,002,890,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Analisa Data Sektoral yang disusun	33 % (10/30)	62,940,400			33 % (10/30)	1,002,890,000
	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah OPD yang mengumpulkan data statistik sektoral	55 OPD	62,940,400			45 OPD	1,002,890,000
		Jumlah OPD yang menyusun atau mengolah data secara terpisah	6 OPD				5 OPD	

		gender						
		Jumlah Data Induk yang dikelola	6 data				4 data	
34	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	45 Orang	19,585,000	Kab. Gresik	APBD	45 Orang	260,000,000
35	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	37 orang	43,355,400	Kab. Gresik	APBD	37 orang	440,000,000
36	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	-	-	Kab. Gresik	APBD	-	302,890,000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			56,568,000				3,445,165,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penanganan Serangan Cyber	100%	56,568,000			100%	3,445,165,000

	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah OPD yang Menerapkan Manajemen Keamanan Informasi	12	56,568,000			9	3,445,165,000
37	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-1 Laporan	5,085,000	Kab. Gresik	APBD	-1 Laporan	307,459,535
38	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-1 Laporan	51,483,000	Kab. Gresik	APBD	-1 Laporan	3,137,705,465

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Di Tahun 2026 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik merencanakan 5 program 12 kegiatan 38 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 22.622.822.105,00, Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 didasarkan pada Surat Edaran Bupati Gresik nomor : 050/1062/437.71/2025 tanggal 18 Juli 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026. Berikut disajikan rencana kegiatan beserta jumlah pendanaan setiap kegiatan secara detail pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. GRESIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						22.622.822.105,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						22.622.822.105,00							0,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						22.289.876.205,00							0,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	-			100 %	7.387.274.773,00						-	0,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen/laporan perencanaan dan capaian kinerja SKPD	-			100 %	10.180.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5.980.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	4.200.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan gaji dan fasilitas penyusunan laporan keuangan SKPD	-			100 %	5.919.334.979,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	5.917.498.979,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.836.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	0,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase fasilitas/ ketersediaan operasional dan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	537.115.594,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.715.200,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku i reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyekudupan -	#GRESIK_ TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Peng embangan Smart Gov ernance Berbasis Satu Data Pembangu nan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	268.227.335,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku i reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyekudupan -	#GRESIK_ TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Peng embangan Smart Gov ernance Berbasis Satu Data Pembangu nan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.979.600,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku i reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyekudupan -	#GRESIK_ TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Peng embangan Smart Gov ernance Berbasis Satu Data Pembangu nan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.718.100,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	#GRESIK_ TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Peng embangan Smart Gov ernance Berbasis Satu Data Pembangu nan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	11.173.299,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	#GRESIK_ TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Peng embangan Smart Gov ernance Berbasis Satu Data Pembangu nan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	1.560.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	#GRESIK_ TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Peng embangan Smart Gov ernance Berbasis Satu Data Pembangu nan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	214.742.060,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan -	#GRESIK_ TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Peng embangan Smart Gov ernance Berbasis Satu Data Pembangu nan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersediaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	54.335.000,00			Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan -	#GRESIK_ TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Peng embangan Smart Gov ernance Berbasis Satu Data Pembangu nan	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	54.335.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan -	#GRESIK_ TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Peng embangan Smart Gov ernance Berbasis Satu Data Pembangu nan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAMBAH AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	TAMBAH CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
														TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase fasilitas/ ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	772.589.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	191.301.200,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	16.810.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				19 Laporan	564.478.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan -	#GRESIK_ TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Peng embangan Smart Gov ernance Berbasis Satu Data Pembangu nan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase fasilitas ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	93.720.000,00			Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan -	#GRESIK_ TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Peng embangan Smart Gov ernance Berbasis Satu Data Pembangu nan	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	93.720.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan -	#GRESIK_ TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Peng embangan Smart Gov ernance Berbasis Satu Data Pembangu nan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pertumbuhan informasi penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasikan Persentase pengaduan layanan publik yang ditindaklanjuti	-			5 Persen 97,1 Persen	8.224.518.800,00						-	0,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan melalui media partner Persentase panggilan kedaruratan yg ditindaklanjuti Persentase pemenuhan daftar informasi dan dokumentasi publik	-			247 Informasi 100 Persen 50 Persen	8.224.518.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	RENCANA CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi di dinas pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				1 Laporan	6.747.922.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0015		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				3 Komunitas	34.367.500,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0017		Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				1 Permohonan	25.965.500,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0019		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				3 Rekomendasi	574.040.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ajukan				2 Media	820.528.300,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CIKAI, HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				1675 Konten	21.695.500,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah kapasitas bandwidth jaringan intra pemerintah daerah persentase pemenuhan kebutuhan server persentase Aplikasi yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	-			2 GB 6,58 Persen 86,1 Persen	6.678.082.632,00						-	0,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang difasilitasi pengembangannya menggunakan SDLC (Software Development Life Cycle) Jumlah aplikasi yang ditempatkan di Pusat Komputasi dan Pusat Data Jumlah area publik dan perangkat daerah yang difasilitasi jaringan internet Jumlah layanan SPBE yang dikelola melalui service desk Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penyelenggaraan SPBE	-			6 Aplikasi 165 Aplikasi 166 Titik 35 Layanan 28 PD	6.678.082.632,00			Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan -	#GRESIK_ TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Peng embangan Smart Gov ernance Berbasis Satu Data Pembangu nan	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional														
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				100 Aplikasi	534.951.700,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan -	#GRESIK_ TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Peng embangan Smart Gov ernance Berbasis Satu Data Pembangu nan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAKSIK AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PENCAPAIAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	SASARAN						KELOMPOK SASARAN	TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				3 Dokumen	46.481.900,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				46 Perangkat Daerah	5.406.558.932,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				4 Aplikasi	522.879.100,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERENCANAAN BAPU RENJA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				30 Aplikasi	44.121.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0035 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE																
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				4 Laporan	19.510.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0037 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah																
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				2 Dokumen	60.680.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0038 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitas/ penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Dokumen	42.900.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						62.940.400,00							0,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	-			2.75	62.940.400,00						-	0,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase data sektoral yang terintegrasi dalam satu data	-			57 Persen	62.940.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				37 Orang	19.585.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral														
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah				1 Laporan	43.355.400,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						270.005.500,00							0,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks KAMI (keamanan informasi)	-			225	270.005.500,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang diamankan	-			58 Aplikasi	270.005.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	230.005.500,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			J U M L A H					22.622.822.105,00							0,00	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik untuk tahun anggaran APBD 2026, mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih, sehingga diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik pada Tahun 2026, Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras serta dengan dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan bidang-bidang agar konsisten dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Kebijakan yang dilakukan :

- peningkatan kualitas informasi melalui media elektronik pada konten Situs Web Pemerintah Kabupaten Gresik dengan mengutamakan Keterbukaan informasi secara aktual dan faktual dalam koridor *e-Government* guna menggugah partisipasi publik secara konstruktif untuk mendukung pembangunan daerah.
- optimalisasi sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik.
- optimalisasi penggunaan perangkat lunak sistem operasional dan program *open source* untuk menekan belanja pembelian perangkat lunak berbayar.
- peningkatan profesionalitas, kreativitas, dan kompetensi aparatur.
- Melakukan Monitoring Basis data di tiap OPD,

- Melakukan Pengembangan data warehouse dengan pengaplikasian SiMantra Builder
- Kebijakan optimalisasi sistem informasi dan sistem aplikasi bagi peningkatan kinerja aparatur dan efektivitas fungsi organisasi perangkat daerah.
- Menyusun dan menerapkan standart data dalam pengelolaan data yang meliputi definisi operasional, metode perhitungan, satuan dan kedalaman data.
- Menetapkan Regulasi tentang Satu Data Dan Data Geospasial.
- penerapan manajemen keamanan informasi secara optimal melalui penyusunan tata kelola keamanan informasi untuk meningkatkan nilai Indeks Keamanan Informasi

Gresik, 28 Oktober 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika

Kabupaten Gresik,



RIKI NURIYADI, S.P., M.M

Pembina TK I

NIP. 19730622 1998031004